



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR SELATAN

KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2024 adalah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Selain memperhatikan ketentuan diatas, penyusunan Laporan Kinerja turut memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, serta Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi. Visi yang telah ditetapkan yaitu "Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "*Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan*". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan suatu misi yaitu "1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi."

Pada tahun 2024, KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan upaya maksimal demi mengoptimalkan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanahkan telah tercapai. Berdasarkan Laporan Kinerja ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan senantiasa akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja pada masa selanjutnya.

Akhir kata, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2024 yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
R. Soehendro Dwitomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
C. Sistematika Laporan.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Perencanaan Strategis	5
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Realisasi Anggaran	89
B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
PENUTUP	91
LAMPIRAN.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Nomor KEP-213/WPJ.15/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Nomor KEP-156/WPJ.15/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.567 triliun. Target tersebut meningkat sebesar 12,57% (*y-o-y*) dari target tahun 2023. Penetapan target tersebut sejalan dengan peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pelaksanaan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. penyuluhan perpajakan;
5. pelayanan perpajakan;
6. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. pelaksanaan ekstensifikasi;
8. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
9. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
11. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
12. pembetulan ketetapan pajak;
13. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
14. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
6. Seksi Pengawasan I s.d Seksi Pengawasan VI;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, Sumber Daya Manusia KPP Pratama Makassar Selatan adalah 106 orang dengan uraian sebagai berikut:

a. Berdasarkan penempatan:

1. Kepala Kantor	: 1 orang
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	: 11 orang
3. Seksi Pelayanan	: 18 orang
4. Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD)	: 5 orang
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	: 9 orang
6. Seksi Pengawasan I	: 10 orang
7. Seksi Pengawasan II	: 7 orang
8. Seksi Pengawasan III	: 7 orang
9. Seksi Pengawasan IV	: 8 orang
10. Seksi Pengawasan V	: 9 orang
11. Seksi Pengawasan VI	: 7 orang
12. Kelompok Jabatan Fungsional	: 14 orang

b. Berdasarkan golongan:

1. Golongan I	: -
2. Golongan II.a	: -
3. Golongan II.b	: 16 orang
4. Golongan II.c	: 5 orang
5. Golongan II.d	: 13 orang
6. Golongan III.a	: 11 orang
7. Golongan III.b	: 15 orang
8. Golongan III.c	: 13 orang
9. Golongan III.d	: 20 orang
10. Golongan IV.a	: 12 orang
11. Golongan IV.b	: 1 orang

c. Berdasarkan tingkat pendidikan:

1. SD	: -
2. SLTP	: -
3. SLTA	: 1 orang

- | | |
|-------------------------|------------|
| 4. D I | : 20 orang |
| 5. D III | : 15 orang |
| 6. Sarjana (S 1) / D IV | : 44 orang |
| 7. Sarjana (S2) | : 26 orang |

Sumber Daya Manusia yang ada tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan serta senantiasa meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang kompeten.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2024 disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab, antara lain:

1. Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum organisasi, termasuk latar belakang penyusunan laporan, tugas dan fungsi organisasi, serta sistematika laporan.

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan perencanaan strategis yang mendasari pelaksanaan kinerja organisasi, serta proses penyusunan dan substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Membahas capaian kinerja organisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan, analisis capaian, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian lainnya, serta evaluasi dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

4. Bab IV – Penutup

Berisi simpulan umum mengenai capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

5. Lampiran

Meliputi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

- **Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

- **Misi Direktorat Jenderal Pajak**

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

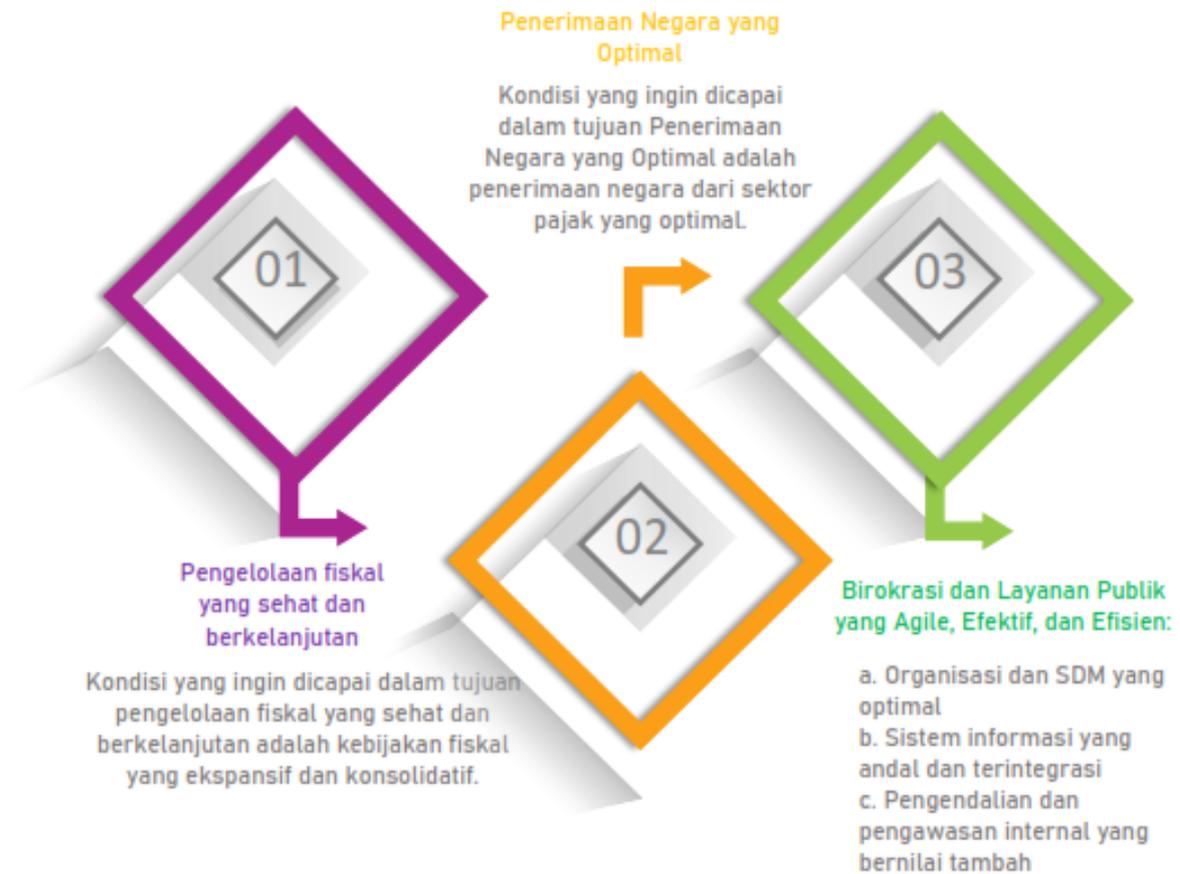
- **Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan**

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:



Sumber: Renstra DJP 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:



Sumber: Renstra DJP 2020-2024

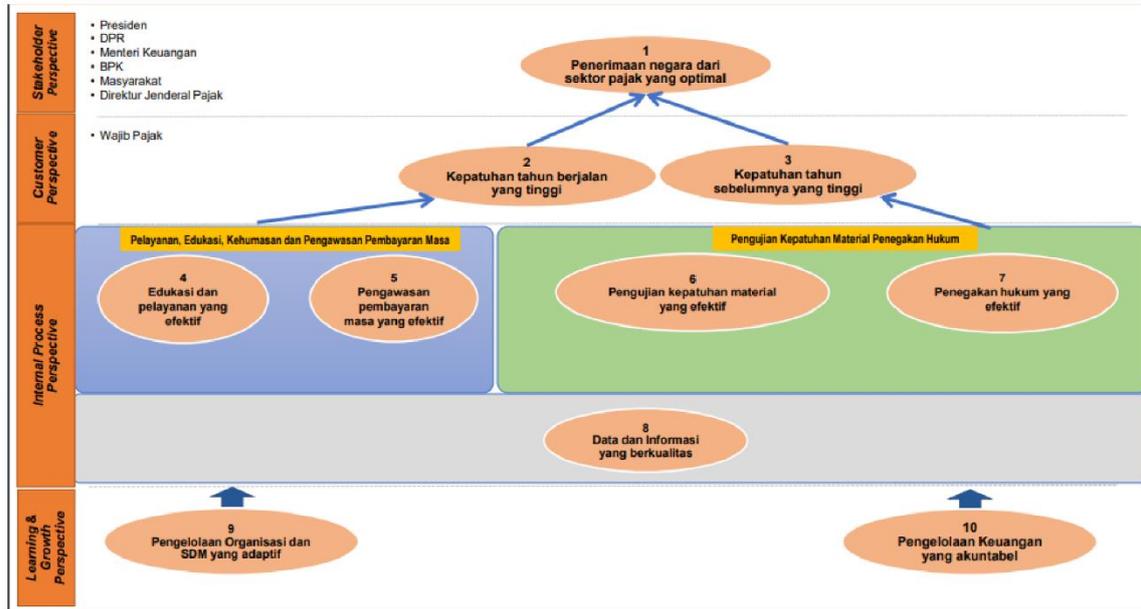
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

▪ Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jendral Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Makassar Selatan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja.

Peta Strategi KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Makassar Selatan Nomor : PK-4/WPJ.15/2024

Berdasarkan peta strategi tersebut diketahui bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat mendukung tercapainya Renstra DJP.

Peta Strategi dan IKU Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KPP Pratama Makassar Selatan nomor : PK-4/WPJ.15/2024 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Makassar Selatan bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	-	-	-	100	100

		dan deviasi proyeksi perencanaan kas					
Customer Perspective							
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100%	100%	100%	100%
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	100%	100%	100%	100%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	100%	100%	100%	100%
Internal Process Perspective							
Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	70%	74%
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	100%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%
Pengujian kepatuhan	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan	100%	*)	100%	100%	100%

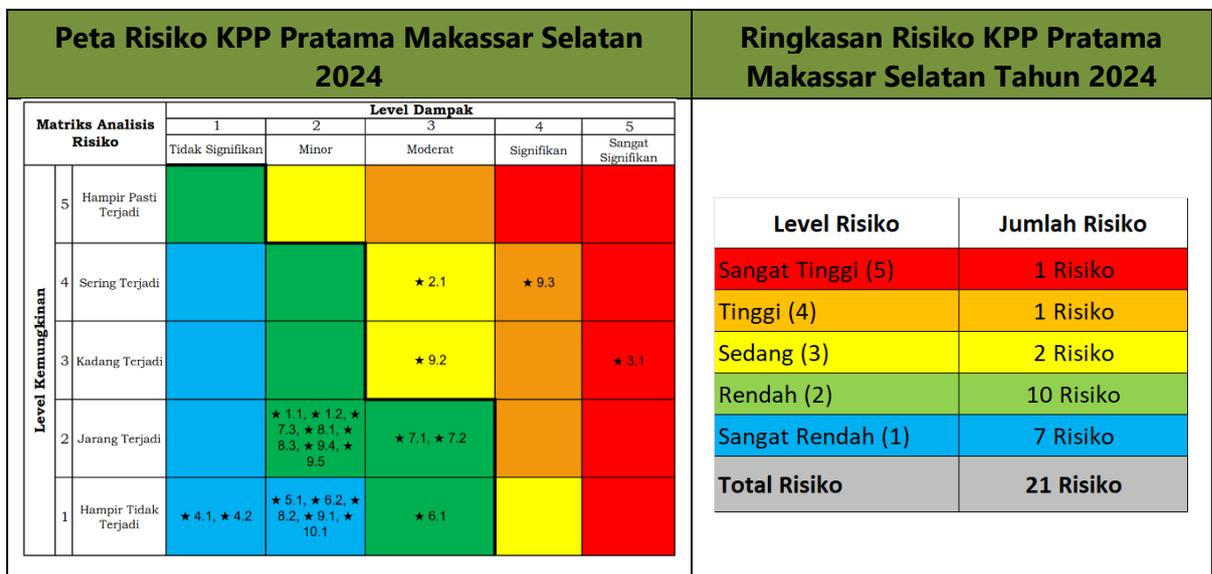
material yang efektif		atas data dan/atau keterangan					
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	100%
	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	100%
Penegakan Hukum yang Efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	100%
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	75%	75%
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%
Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	100%
	8b-CP	Persentase penghimpunan data dari ILAP	-	-	-	55%	55%
Learning & Growth Perspective							
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	100
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	80	85	85	85
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen	-	-	-	-	90

		kinerja dan manajemen risiko					
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100

▪ **Manajemen Risiko**

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh elemen dan unit di KPP Pratama Makassar Selatan. Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Makassar Selatan yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

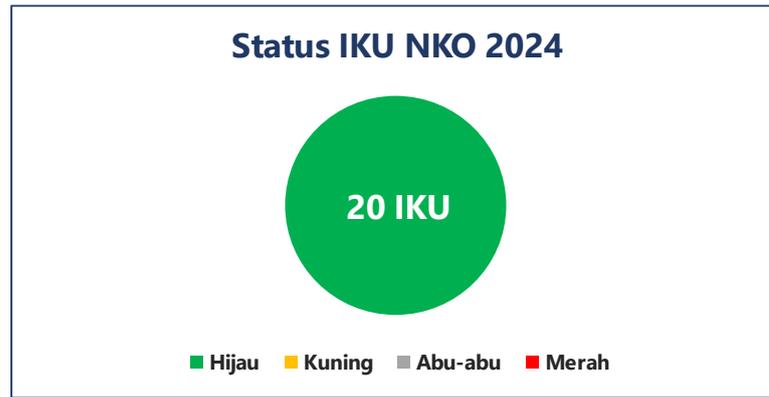
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Perkembangan NKO KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:





Secara keseluruhan NKO tahun 2024 mencapai **110,18**, nilai ini lebih rendah 0,16 poin dari NKO tahun 2023 yang memiliki capaian sebesar **110,34**. Meskipun demikian, pada tahun 2024 keseluruhan IKU K3 KPP Pratama Makassar Selatan telah tercapai melebihi target dan berada pada zona hijau.

Summary capaian NKO Tahun 2024 yang terdiri dari 20 IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				100,94
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,94
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,68%	100,68
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,30	101,30
Customer Perspective				88,31
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,18
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,34%	100,34
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	127,42%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			105,37
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,37%	105,37
Internal Process Perspective				117,64
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,70
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	111,39%	111,39
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,55%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,98
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,94%	119,94
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			112,50
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,27%	119,27
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	99,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	68,80%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,36
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,71
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,19%	117,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	93,40	109,88
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024				110,18

Penjelasan atas kinerja setiap IKU yang terdapat pada IKU Kepala KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2024 dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Sasaran Strategis : SS-1 *Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal*

IKU : 1a-CP *Persentase realisasi penerimaan pajak*

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	21,00%	46,00%	46,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,69%	44,06%	44,06%	63,00%	63,00%	100,68%	100,68%
Capaian	98,52%	95,78%	95,78%	84,00%	84,00%	100,68%	100,68%

Target Penerimaan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2024 telah diamanahkan dalam KEP-213/WPJ.15/2024, berdasarkan KEP tersebut telah ditetapkan target penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan sebesar Rp 1.567.569.762.000

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Makassar berhasil mencapai realisasi penerimaan negara dari Pajak sebesar Rp 1.578.165.171.236, atau sebesar 100.68%

▪ Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

▪ Defini IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

▪ Formula IKU

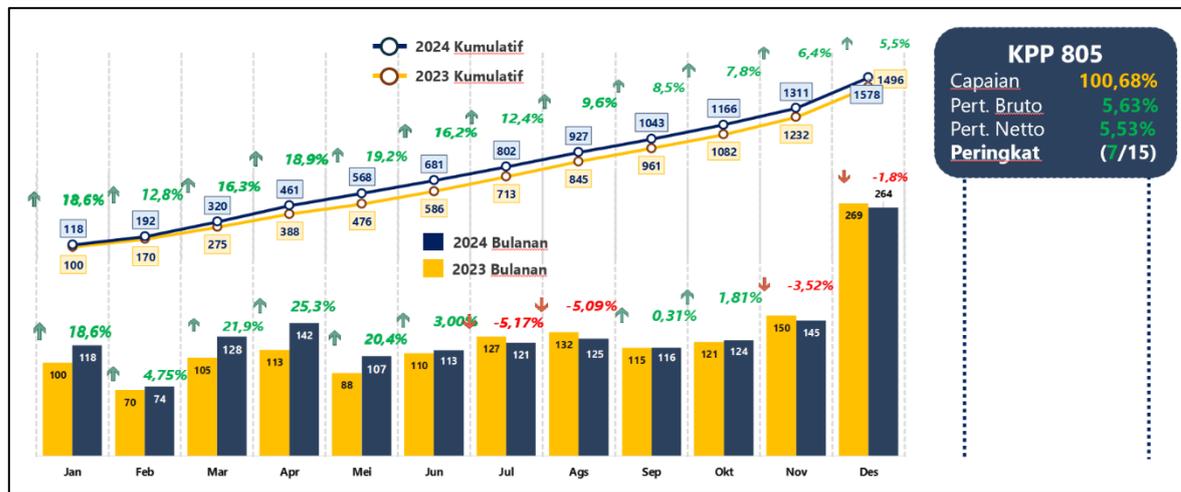
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

▪ Realisasi IKU

KPP	TARGET APBN 2024 (KEP-213/WPJ.15/2024)		
	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN	1.567.569.762.000	1.578.165.171.236	100,68%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	90,75%	90,28%	120,98%	107,97%	100,68%



Secara akumulatif penerimaan pajak netto KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 per bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari sudut pandang pertumbuhan tiap bulan terdapat kontraksi pertumbuhan netto pada bulan-bulan tertentu yakni bulan Juli, Agustus, November, dan Desember. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan pembayaran pada beberapa instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Kode IKU	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi Tahun 2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,68%

Secara nasional tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa faktor yang turut mendukung membaiknya kinerja penerimaan hingga akhir Desember 2024 antara lain:

- 1) Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- 2) Pertumbuhan positif pada mayoritas sektor usaha;
- 3) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yang mencakup pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta penerapan pajak untuk kripto, fintech-P2P lending, dan PPN PMSE;
- 4) Berakhirnya pemberian fasilitas pajak pada sebagian besar sektor; dan
- 5) Pertumbuhan kumulatif yang positif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,68%

Penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan positif pada jenis-jenis pajak utama. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri, yang dipengaruhi oleh semakin terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi. Implementasi UU HPP yang menetapkan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% juga turut mendorong peningkatan kinerja PPN Dalam Negeri. Selain itu, kinerja PPh Migas dan PPh Non-Migas menunjukkan perbaikan yang secara umum didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta penerapan bauran kebijakan yang efektif.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
KPP Pratama Makassar Selatan telah melaksanakan strategi pengamanan penerimaan untuk mencapai dan menciptakan pengelolaan penerimaan pajak yang berbasis sumber penerimaan berdasarkan tahun ekonomi dan tahun pajak, yang dilaksanakan melalui dua kebijakan prioritas yaitu:

- 1) Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- 2) Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai faktor yang mendukung keberhasilan serta tantangan yang menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi yang meningkat serta penerapan bauran kebijakan yang efektif. Pertumbuhan penerimaan neto pada mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan tersebut antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, yang mencakup:
 - Program Pengungkapan Sukarela (PPS);
 - Penyesuaian tarif PPN;
 - Penerapan pajak kripto dan pajak fintech-P2P lending;
 - PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
 - 3) Pengawasan wajib pajak yang efektif oleh segenap insan DJP dalam mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

- 4) Pengelolaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang berjalan secara efektif;
 - 5) Berkurangnya ketidakpastian siklus usaha pascapandemi, yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b) Pendorong Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak
- Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, beberapa kendala tetap muncul, antara lain:
- 1) Implementasi peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada semester II tahun 2024;
 - 3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19;
 - 4) Tren restitusi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- c) Upaya Solusi atas Kendala Penurunan Kinerja Penerimaan Pajak
- Untuk mengatasi kendala tersebut, organisasi melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:
- 1) Optimalisasi perencanaan penerimaan di level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak untuk menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi one-on-one antara Kantor Wilayah dan Tim Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
 - 3) Penyediaan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan di level nasional dan kantor wilayah;
 - 4) Penyusunan laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak;
 - 5) Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PPM dan PKM per Kanwil DJP untuk memastikan tercapainya rencana penerimaan yang telah disusun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dicapai melalui penerapan berbagai langkah efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain:
- a) Mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi proses kerja serta membentuk basis data yang memudahkan analisis pekerjaan. Hal ini memungkinkan kegiatan administrasi perpajakan dilakukan secara lebih efisien.
 - b) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan produktivitas kerja.
 - c) Memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai, sehingga sumber daya keuangan dapat dikelola secara efisien.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian kinerja realisasi penerimaan pajak merupakan hasil dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut antara lain:

- a) Melakukan ekstensifikasi pajak dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah dan efektif.
- c) Mengembangkan sistem inti administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan administrasi perpajakan.
- d) Mengoptimalkan pertukaran data dan informasi terkait perpajakan guna mendukung penguatan administrasi perpajakan yang lebih akurat dan terintegrasi.

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dicapai melalui upaya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi meliputi:

- a) Melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus pada sektor-sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas untuk mengatasi risiko fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi.
- b) Memperkuat pengawasan berbasis risiko serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak.
- c) Secara konsisten melakukan kampanye edukasi pajak serta membangun budaya kepatuhan pajak melalui kerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan lainnya untuk mengatasi risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:

- a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional serta meningkatkan sinergi melalui joint program, joint analysis, dan joint business process.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
2. Menyusun rencana pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025
3. Memanfaatkan seluruh data yang tersedia dalam approweb, apportal dan sumber data
4. internal lain;
5. Memanfaatkan data dari pihak eksternal yang memiliki potensi
6. Meningkatkan pengawasan terhadap bendahara terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

7. Melakukan strategi pengawasan Wajib Pajak baru terdaftar
8. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Non Efektif namun ada transaksi

2. Sasaran Strategis : SS-1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU : 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	117,69	108,52	108,52	104,59	104,59	101,3	101,3
Capaian	117,69%	108,52%	108,52%	104,59%	104,59%	101,30%	101,30%

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

IKU DEVIASI PERENCANAAN KAS 2024					
TRIWULAN	BULAN	PROGNOSA	REALISASI	DEVIASI BULANAN	DEVIASI TRIWULAN
TRIWULAN I	Januari	116.638.048.000	118.186.382.705	1,33%	1,11%
	Februari	74.194.349.000	73.823.163.861	0,50%	
	Maret	129.525.765.000	127.594.956.845	1,49%	
TRIWULAN II	April	133.798.856.000	141.694.107.136	5,90%	14,08%
	Mei	97.809.299.000	106.561.756.170	8,95%	
	Juni	155.540.023.000	112.928.186.717	27,40%	
TRIWULAN III	Juli	123.809.879.000	120.839.957.458	2,40%	7,54%
	Agustus	138.506.414.000	125.699.880.362	9,25%	
	September	106.713.411.000	118.437.905.155	10,99%	
TRIWULAN IV	Oktober	125.773.919.000	123.586.724.533	1,74%	2,77%
	November	150.298.708.000	144.577.861.283	3,81%	
	Desember	263.128.526.000	264.234.289.011	0,42%	
DEVIASI S.D TRIWULAN IV 2024					6,38%
REALISASI IKU S.D TW4 (MAX 120%)					100,0%

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi ini dihitung secara bulanan yang kemudian dihimpun menjadi deviasi triwulanan dan dilakukan akumulasi menjadi deviasi tahunan. Berdasarkan tabel diatas KPP Pratama Makassar Selatan berhasil berhasil mengakurasi perencanaan kas dengan nilai deviasi tahunan sebesar 6,38% sehingga realisasi IKU deviasi akurasi perencanaan kas telah berhasil mencapai 100% hal ini didapat dari konversi penghitungan realisasi deviasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan Bendahara Umum Negara (BUN) mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

IKU PERTUMBUHAN BRUTO 2024				
KOMPONEN PERTUMBUHAN UNIT KERJA (40%)	BRUTO 2023	BRUTO 2024	PERTUMBUHAN UNIT KERJA	% KOMP. PERTUMBUHAN UNIT KERJA (Maks 120%)
	(a)	(b)	$c = (b-a)/a$	$d = 1 + c$
	1.551.242.123.548	1.638.632.778.848	5,63%	105,63%
KOMPONEN PERTUMBUHAN NASIONAL (60%)	PERTUMBUHAN NASIONAL	PERTUMBUHAN UNIT KERJA	% KOMP. PERTUMBUHAN NASIONAL (Maks 120%)	
	(a)	(b)	$c = (1+b) / (1+a)$	
	5,02%	5,63%	101%	
REALISASI IKU PERT. BRUTO (40% UNIT KERJA) + (60% NASIONAL)			102,60%	

Capaian IKU pertumbuhan bruto sebesar 102,60% dihitung berdasarkan penggabungan komponen pertumbuhan unit kerja sebesar 40% dan komponen pertumbuhan nasional sebesar 60%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	118,95	101,3

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan kas tahun 2024 sebesar 101,30.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	101,30

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan kas sebagai berikut:

- 1) Menyusun prognosa penerimaan per bulan dengan menggunakan pemisahan metode penghitungan antara penerimaan pajak yang bersifat pembayaran rutin dan non rutin;
- 2) Melibatkan unit seksi/bagian yang berkaitan dengan penghimpunan penerimaan maupun restitusi untuk melakukan feeding data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menghitung prognosa penerimaan.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai faktor yang mendukung keberhasilan serta tantangan yang menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan kas. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Ekonomi: Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut pasca-pandemi meningkatkan aktivitas ekonomi, yang berdampak positif pada penerimaan pajak dari sektor PPh dan PPN.
- 2) Penerapan Kebijakan Baru: Kebijakan reformasi fiskal seperti penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak digital, serta pengawasan ketat terhadap sektor-sektor pajak yang berisiko memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak bruto.

▪ **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pengelolaan penerimaan pajak bruto dan proyeksi kas dilakukan secara efisien dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pemanfaatan Aplikasi DRM untuk melakukan penghitungan yang lebih efisien;
- 2) Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang analisis data untuk memastikan penghitungan proyeksi dapat dihitung secara efektif.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak bruto dan mengurangi deviasi proyeksi kas adalah program join analisis yang dilakukan oleh seksi Penjaminan Kualitas Data dengan Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan dan Seksi P3

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko terhadap deviasi penerimaan kas dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan kontribusi pajak dari sektor-sektor non-komoditas dan sektor digital untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
- 2) Memanfaatkan dashboard DRM untuk memantau penerimaan pajak secara real-time dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Langkah yang diambil untuk kendala ini adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- 1) Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- 2) Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun 2025 KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

1. menyusun prognosa penerimaan bulanan dengan lebih seksama dan melibatkan semua elemen unit yang bertanggung jawab langsung kepada penerimaan untuk memberikan *feeding data*;
2. menggunakan metode penghitungan prognosa khusus untuk wajib pajak bendahara;
3. melakukan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menyusun prognosa penerimaan pajak setiap bulannya serta memanfaatkan aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM) yang telah disediakan oleh KPDJP; dan
4. aktif melakukan diskusi antara Kepala KPP Pratama Makassar Selatan dengan unit seksi/bagian yang menghimpun penerimaan negara untuk menentukan metode penghitungan yang paling relevan dengan situasi dan kondisi yang ada.

3. Sasaran Strategis : SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU : 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	21,00%	46,00%	46,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,60%	43,95%	43,95%	63,90%	63,90%	100,34%	100,34%
Capaian	98,10%	95,54%	95,54%	85,20%	85,20%	100,34%	100,34%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara nomor ND-72/WPJ.15/2025 perihal Penyampaian Perubahan Target Keempat Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kantor Pelayanan Pajak Tahun 2024, KPP Pratama Makassar Selatan mendapatkan target Penerimaan PPM sebesar Rp1.464.416.679.000

JENIS TARGET	Target PPM 2024	Realisasi PPM 2024	% Realisasi IKU	Trajectory TW4	% Capaian IKU
TARGET KEP-231	Rp1.464.416.679.000	1.469.505.976.007	100,35%	100,00%	100,35%

Dari target penerimaan pajak dari PPM yang telah ditetapkan, Realisasi penerimaan yang tercapai ialah sejumlah Rp1.469.505.976.007 atau sebesar 100,35% dari target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	90,90%	124,97%	112,55%	100,34%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar 100,34% lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Kode IKU	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi Tahun 2024
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,00%	100,34%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,34%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pembayaran, penyeteroran, dan pelaporan perpajakan dengan rincian kegiatan:
 - Melakukan pengecekan secara periodik dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas daftar nominatif yang tersedia di aplikasi atas tahun pajak berjalan;
 - Melakukan penelitian dan tindaklanjut atas potensi kenaikan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25;
 - Menerbitkan himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); dan
 - Melakukan pemantauan atas penerimaan dari sektor unggulan, dalam hal terdapat penurunan setoran yang signifikan akan dimintakan klarifikasi setelahnya.
- 2) Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan dengan rincian kegiatan:

- Melakukan identifikasi Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas perpajakan;
- penelitian dan imbauan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam hal Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan insentif perpajakan.

3) pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan rincian kegiatan:

- melakukan pengecekan secara periodik dan tindak lanjut atas daftar nominatif yang tersedia di aplikasi atas data tahun pajak berjalan;
- menerbitkan SP2DK non-komprehensif untuk data tahun berjalan.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai faktor yang mendukung keberhasilan serta tantangan dalam pelaksanaan kinerja IKU. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan: Tercapainya target penerimaan pajak dari PPM didukung oleh pemantauan yang lebih aktif dan peningkatan kualitas layanan wajib pajak.
- 2) Kegagalan/Penurunan: Beberapa sektor ekonomi mengalami perlambatan yang berdampak pada realisasi pembayaran pajak.
- 3) Alternatif Solusi:
 - Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan penerimaan pajak.
 - Meningkatkan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran tepat waktu.
 - Memanfaatkan teknologi dalam analisis kepatuhan wajib pajak.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang Menunjang Keberhasilan:

- 1) Penerapan monitoring ketat terhadap daftar nominatif wajib pajak potensial.
- 2) Peningkatan kapasitas pegawai dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Implementasi dashboard revenue management sebagai tools pemantauan pembayaran pajak secara real-time.

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja IKU, adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan PPM telah dilakukan dan menunjukkan perbaikan dalam kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penyesuaian strategi pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi risiko ketidakpatuhan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU:

- 1) Kesulitan dalam menindaklanjuti wajib pajak dengan aktivitas usaha yang fluktuatif.
- 2) Keterbatasan dalam mengakses data transaksi bisnis yang relevan.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pertukaran data.
- 2) Menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menargetkan wajib pajak dengan potensi ketidakpatuhan tinggi.
- 3) Melakukan analisis lebih dalam terhadap pola pembayaran wajib pajak di sektor-sektor strategis.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- 1) Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- 2) Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi di bidang usaha tertentu;
2. Melakukan Penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 akibat pembetulan SPT tahunan oleh wajib pajak;
3. Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan, atau upaya hukum;
4. Meneliti dan mengidentifikasi hasil penelitian pemenuhan formal, material dan realisasi pemanfaatan Fasilitas Perpajakan;
5. Memetakan WP pasca covid yang memanfaatkan fasilitas PPN dan PPh dengan melakukan analisis laporan keuangan, analisis PK-PM, ekualisasi biaya, usulan dimasukkan ke dalam DPP, dilakukan visit (konfirmasi data dan lapangan), konseling;
6. Melakukan Analisis Tren Aset Tahun Berjalan;
7. Melakukan pengawasan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP, dan laporan lainnya;
8. Membuat pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP yang jatuh temponya di tahun 2024;
9. Melakukan identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal (Approweb dan aplikasi pendukung lainnya) dan data eksternal.
10. Monitoring potensi pembayaran pajak instansi/lembaga pemerintah
11. Mengawasi 90% WP penentu penerimaan oleh masing-masing AR
12. Memonitoring naik turunnya pembayaran Wajib Pajak

4. Sasaran Strategis : SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU : 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	116,96%	139,17%	139,17%	131,06%	131,06%	127,42%	127,42%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara nomor ND-6547/WPJ.15/2024, target Kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebesar 55.043 SPT.

UNIT ORGANISASI	TOTAL SPT MASUK	JENIS SPT MASUK				WAJIB SPT	TARGET SPT	REALISASI IKU	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN IKU (Maks 120%)
		WAJIB SPT		NON WAJIB SPT						
		TEPAT WAKTU	TERLAMBAT LAPOR	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT LAPOR					
STRATEGIS	595	528	67			600	600	116,77%	100%	116,77%
KEWILAYAHAN	62.781	33.267	1.737	25.626	2.151	63.184	54.443	127,54%	100%	120,00%
KPP MAKSEL	63.376	33.795	1.804	25.626	2.151	63.784	55.043	127,42%	90%	120,00%

Realisasi tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Tahun 2024 diukur dari realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023. Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Makassar Selatan yaitu sebesar 63.376 WP atau sebesar 127,42%. Tercapainya tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak tahun 2024 tidak terlepas usaha para fiskus dalam melaksanakan asistensi kepada seluruh kalangan Wajib Pajak serta antusiasme Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan yang tinggi.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	101,40%	105,61%	102,21%	127,42%

capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 berhasil mencapai 127,42% lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 102,21% dan lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 105,61%.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	127,42%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Satgas SPT Tahunan termasuk mencantumkan target Wajib Pajak (nama dan nomor telepon) kepada masing-masing subtim;
2. Melakukan pembagian target SPT Tahunan per Subtim *Account Representative* (AR) dan dan terus menerus melakukan monitoring atas capaian target tersebut; dan
3. Menentukan alur pelayanan dalam rangka penerimaan SPT Tahunan agar layanan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan: Adanya peningkatan penggunaan e-Filing dan efektivitas kampanye edukasi pajak.

Kegagalan/Penurunan: Masih adanya wajib pajak yang mengalami kesulitan melakukan pelaporan pajak secara online melalui e-Filing / e-Form

Alternatif Solusi adalah Mengadakan sesi edukasi langsung bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang berjalan dan menunjang keberhasilan pencapaian IKU, antara lain:

- 1) Pembentukan Satuan Tugas penerimaan SPT Tahunan Tahun 2024
- 2) Pelaksanaan kelas pajak dan edukasi kepada wajib pajak
- 3) Asistensi langsung ke instansi pemerintah yang berada pada administrasi KPP Pratama Makassar Selatan

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja IKU, adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT.
- 2) Pemantauan implementasi strategi edukasi pajak yang dilakukan sebelumnya.
- 3) Penyiapan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaporan SPT secara daring yang dilakukan oleh Wajib Pajak di loket satgas.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang ditemukan saat pelaksanaan IKU adalah masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami tata cara pelaporan SPT.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala pelaksanaan IKU:

- 1) Menyediakan panduan sederhana dalam berbagai format (video, infografis, brosur).
- 2) Mengadakan program asistensi bagi wajib pajak di wilayah administrasi KPP Pratama Makassar Selatan
- 3) Meningkatkan pelatihan bagi petugas pajak dalam memberikan asistensi kepada wajib pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- 1) Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- 2) Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Aktif melakukan kampanye pelaporan SPT tahunan melalui media sosial KPP Pratama Makassar Selatan;
2. Melakukan penyuluhan di kantor-kantor tertentu sekaligus asistensi pelaporan melalui efililing;
3. Memberikan souvenir bagi Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT tahunan lebih Awal guna mendorong Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT Tahunan;
4. Menyusun SK penetapan satgas SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai;
5. Membuat loket khusus pelaporan SPT Tahunan Badan dan loket untuk asistensi pelaporan efililing dengan memberlakukan sistem antrian agar pelaporan SPT tahunan dapat berjalan dengan tertib;
6. Permintaan efin dan aktivasi efin yang dilakukan melalui loket khusus untuk mengurai antrean
7. Melibatkan relawan pajak dengan membuat jadwal untuk membantu satgas SPT tahunan;
8. Menyusun jadwal satgas dan mengingatkan petugas setiap pagi melalui grup whatsapp kantor;
9. Menyediakan fasilitas laptop dan wifi untuk wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunan secara mandiri;

5. Sasaran Strategis : SS-3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU : 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,15%	45,97%	45,97%	51,07%	51,07%	105,37%	105,37%
Capaian	88,60%	91,94%	91,94%	68,09%	68,09%	105,37%	105,37%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara nomor ND-72/WPJ.15/2025 perihal Penyampaian Perubahan Target Keempat Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kantor Pelayanan Pajak Tahun 2024, KPP Pratama Makassar Selatan mendapatkan target Penerimaan PKM sebesar Rp103.153.083.000

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	82,89%	104,84%	68,44%	105,37%

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Kode IKU	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi Tahun 2024
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	100,00%	105,37%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	105,37%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan Wajib Pajak sektoral dengan mempertimbangkan sektor prioritas nasional dan sektor unggulan di lingkup Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
2. Melakukan pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas yaitu:
 - Wajib Pajak High Wealth Individual (HWI) dan Perusahaan Grup;
 - Transaksi afiliasi; dan
 - Ekonomi digital.
3. Melakukan pengawasan Pembayaran dan Pelaporan dengan kegiatan yaitu:
 - Melakukan monitoring atas ketepatan waktu pembayaran dan/atau pelaporan WP untuk selain tahun pajak berjalan;
 - Menerbitkan STP untuk menagih sanksi berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan pelaporan dan penyeteroran baik yang berasal dari SPT Normal maupun Pembetulanannya.
4. Melakukan tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber daya Aparatur (KITSDA);
5. Melakukan proses kegiatan pengawasan yang efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan ini akan menyelaraskan antara DPP dan Daftar

Sasaran Analisis (DSA) yang akan ditindaklanjuti oleh KPP, serta mendorong penyelesaian proses bisnis pengawasan sesuai dengan SE-05/PJ/2022.;

6. Melakukan pengusulan pemeriksaan dengan melakukan segmentasi prioritas pemeriksaan;
 7. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan daluwarsa penetapan, ketersediaan ruang usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan ruang terbit, target PKM pemeriksaan serta konversi hasil pemeriksaan;
 8. Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan melalui kegiatan peer review dan monitoring kegiatan pemeriksaan;
 9. Melakukan optimalisasi komite kepatuhan untuk Menyusun strategi untuk mencapai penerimaan dari PKM.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 telah mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
 1. Potential gain akibat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 59 Tahun 2022 yang mengatur tentang kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah;
 2. Pemberlakuan PPN 11% akibat dari UU HPP;
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Keberhasilan pelaksanaan kinerja IKU ini terjadi karena beberapa pelaksanaan program antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang efektif
 - 2) Pemanfaatan data internal dan eksternal untuk melakukan pengawasan kepatuhan
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi yang dilakukan dalam pelaksanaan IKU antara lain:
 - 1) Penguatan prosedur mitigasi risiko terhadap wajib pajak yang memiliki riwayat ketidakpatuhan.
 - 2) Monitoring rutin atas realisasi penerimaan dari PKM
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah kurang meratanya kemampuan petugas pajak dalam melakukan analisis kepatuhan wajib pajak, Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sharing session antar account representative ataupun melaksanakan IHT
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

▪ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu;
2. Menyusun Peta Kepatuhan dan DSPP tahun 2025;
3. Membuat monitoring Penyelesaian Pemeriksaan yang dikerjakan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP);
4. Melakukan tindakan penagihan dengan lebih intensif dan akurat;

5. Melakukan visit dan konfirmasi ke Account Representative (AR)/FPP atau pihak lainnya untuk memperoleh data serta informasi aset Wajib Pajak dalam rangka proses penggalian potensi *ability to pay* atas tunggakan yang belum dibayar oleh Penunggak Pajak;
6. Menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang masih belum diterbitkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Laporan Hasil Penelitian (LHPt) yang diterbitkan di tahun sebelumnya untuk segera diterbitkan LHP2DK;
7. Mengurutkan Wajib Pajak berdasarkan Jenis dan Nilai data pemicu dan data penguji untuk menentukan urutan WP yang akan dilakukan analisis;
8. Menerbitkan LHPt atas data pemicu dan data penguji selain Tahun Berjalan; dan
9. Meneliti serta mengawasi pembayaran, penyeteroran dan pelaporan perpajakan melalui aplikasi approweb dengan melakukan perbandingan data pihak ketiga.
10. Menentukan sektor tematik untuk dilakukan penggalian potensi, kemudian lakukan kolaborasi antara tim pengawasan, penyuluhan, dan pemeriksaan dalam rangka penggalian potensi yang lebih maksimal

6. Sasaran Strategis : SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

IKU : 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	43,54%	66,52%	66,52%	86,49%	86,49%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 88,80% dengan trajectory 74%, maka Persentase Capaian IKU nya adalah **120%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar **88,80%**. Capaian atas IKU ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88,80%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi atas DSPT kolaboratif dan DSPT mandiri;
2. Meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi secara daring maupun luring melalui berbagai media;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan untuk mendorong Wajib Pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan; dan
4. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku lapor dan bayar.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan: Adanya peningkatan pemanfaatan e-Filing dan pembayaran pajak tepat waktu oleh wajib pajak.

Kegagalan/Penurunan: Kurangnya keterlibatan wajib pajak dalam program edukasi karena keterbatasan akses atau kurangnya motivasi.

Alternatif Solusi:

- Menyediakan souvenir bagi wajib pajak yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan edukasi
- Memperluas cakupan penyuluhan dengan memanfaatkan teknologi webinar dan modul edukasi mandiri.
- Mengembangkan sistem reminder otomatis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, antara lain:

- 1) Kampanye pajak melalui media sosial dan platform digital.
- 2) Peluncuran aplikasi edukasi pajak berbasis seluler.
- 3) Penyuluhan terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko dalam pelaksanaan kinerja IKU, diantaranya:

- 1) Evaluasi terhadap efektivitas strategi edukasi pajak berbasis digital.
- 2) Penguatan sinergi antara DJP dengan lembaga pendidikan dan komunitas bisnis.
- 3) Penyempurnaan materi penyuluhan agar lebih sederhana dan mudah dipahami.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala:

Kurangnya minat wajib pajak dalam mengikuti kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Langkah yang Diambil:

- Meningkatkan metode penyampaian edukasi dengan pendekatan storytelling dan gamifikasi.
- Menyediakan materi edukasi dalam berbagai format, termasuk video pendek dan infografis.
- Menjalin kerja sama dengan media lokal untuk meningkatkan jangkauan penyuluhan pajak.

▪ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah meningkatkan kesadaran Pajak dengan melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perpajakan melalui:

1. Kegiatan penyuluhan One to Many secara daring maupun luring;
2. Penyuluhan melalui media audio (Siniar) - Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah;
3. Penyuluhan melalui media audio visual (Media Sosial) - Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah; dan
4. *Tax Goes To School* ataupun Pajak Bertutur.
5. Menyelenggarakan kegiatan edukasi pengenalan coretax system kepada wajib pajak.
6. Memanfaatkan sosial media dalam kegiatan edukasi perpajakan baik dengan melakukan posting ulang maupun membuat konten mandiri;

7. Sasaran Strategis : SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

IKU : 4b-N Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2023

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85%	100%
Realisasi	6,26%	6,33%	12,59%	18,00%	18,00%	111,39%	111,39%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,39%

Hasil survei Bersumber dari hasil survei sebagaimana tautan <https://s.id/SurveiDJPTriwulanan> tanggal 31 Desember 2024 . Realisasi Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2023 adalah sebesar **111,39%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	111,39%

Realisasi Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan Tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian untuk IKU ini adalah 120%.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Kode IKU	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi Tahun 2024
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	100,00%	100,00%	111,39%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	111,39%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

KPP Pratama Makassar Selatan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan dan penyuluhan yang optimal kepada seluruh wajib pajak;
- Menyusun *longlist* wajib pajak yang memiliki kapabilitas untuk dilakukan survei.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan: Peningkatan skor indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan berdasarkan survei kepuasan wajib pajak.

Alternatif Solusi:

- Melakukan analisis mendalam terhadap hasil survei untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan layanan perpajakan digital.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program Sukses:

- 1) Pelaksanaan survei berkala untuk mengukur efektivitas layanan.
- 2) Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan pajak.
- 3) Pemanfaatan chatbot dan FAQ digital untuk menjawab pertanyaan wajib pajak secara cepat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Evaluasi hasil survei kepuasan wajib pajak dan penerapan rekomendasi perbaikan.
- 2) Peningkatan sinergi antarunit dalam menyelaraskan standar pelayanan pajak.
- 3) Penggunaan hasil survei sebagai dasar kebijakan peningkatan kualitas penyuluhan dan pelayanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala:

- 1) Partisipasi rendah dalam survei kepuasan wajib pajak yang mempengaruhi akurasi hasil.
- 2) Masih ada perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak terkait kualitas layanan.

Langkah yang Diambil:

- 1) Meningkatkan insentif partisipasi wajib pajak dalam survei melalui kampanye kesadaran pajak.
- 2) Menyederhanakan format survei agar lebih mudah dipahami dan diisi oleh wajib pajak.
- 3) Menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan keterlibatan wajib pajak dalam survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi, pelatihan dan pengarahan rutin kepada pemberi layanan agar pelayanan dapat selalu prima dan memuaskan Wajib Pajak
2. Membuat longlist wajib pajak yang capable untuk dilakukan survey dengan lebih teliti dan seksama

**8. Sasaran Strategis : SS-5 Pengawasan pembayaran masa
IKU : 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi		120,00%	120,00%	105,93%	105,93%	116,55%	116,55%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	117,70%	117,70%	120,00%	120,00%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Merupakan penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

2. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Realisasi PPM WP Strategis Tahun 2024 adalah 116,55% yang apabila diformulasikan dengan trajectory TW4 sebesar 90% maka Capaian Persentase pengawasan pembayaran masa sebesar **120%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	108,56%	119,32%	116,55%

Dalam tiga tahun terakhir KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan upaya yang terus menerus dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga realisasi atas IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa senantiasa meningkat.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Kode IKU	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi Tahun 2024
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	116,55%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	116,55%

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran masa (*timely payment*) dengan cara :
 - Mempercepat penerbitan STP tahun berjalan sesuai daftar nominative (dafnom);
 - Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan sesuai dengan daftar nominatif;
 - Melakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25 baik terhadap wajib pajak yang terdapat pada daftar nominatif maupun yang berada diluar dafnom.
1. Melakukan upaya peningkatan kepatuhan pendaftaran WP baru (*registration in the system*); dan
2. Membuat monitoring penyelesaian penerbitan STP tahun berjalan, penerbitan penelitian dinamisasi dan penambahan Wajib Pajak baru atas hasil ekstensifikasi.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Keberhasilan: Peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak akibat intensifikasi pengawasan dan sosialisasi.
- Alternatif Solusi:
 - 1) Memberikan keringanan atau fleksibilitas dalam pembayaran pajak bagi sektor usaha yang terdampak.
 - 2) Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengawasan transaksi pembayaran pajak.
 - 3) Memperluas akses layanan pembayaran pajak digital untuk mempermudah wajib pajak.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Program Sukses:
 - 1) Implementasi pelaksanaan imbauan untuk mencegah keterlambatan pembayaran pajak.
 - 2) Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan mengenai kewajiban pembayaran pajak secara berkala.
 - 3) Optimalisasi peran petugas pajak dalam memberikan asistensi kepada wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Evaluasi efektivitas imbuhan untuk mencegah keterlambatan pembayaran.
- 2) Penguatan prosedur mitigasi bagi wajib pajak yang berisiko tinggi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala:

- Wajib pajak masih mengalami kendala teknis dalam pembayaran secara digital.
- Kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran masa.

Langkah yang Diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Menyediakan layanan bantuan dan konsultasi pajak secara daring dan luring.
- 2) Memperluas sosialisasi terkait pembayaran pajak dengan melibatkan berbagai media komunikasi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dan mengawasi pembayaran, penyetoran dan pelaporan perpajakan melalui aplikasi approweb;
2. Menerbitkan himbauan Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
3. Meneliti dan mengidentifikasi hasil penelitian pemenuhan formal, material dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan;
4. Melakukan tindak lanjut kepada wajib pajak yang menerima fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan;
5. Menindaklanjuti data DSPE existing dan melakukan penelitian secara seksama atas data ILAP yang nantinya akan diusulkan sebagai DSPE;
6. Menerbitkan SP2DK dengan mengidentifikasi dan meneliti data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal (Approweb atau aplikasi pendukung lainnya) dan data data eksternal;
7. Melakukan pengawasan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP, dan laporan lainnya; dan
8. Melakukan pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP yang jatuh temponya di tahun 2024.

9. Sasaran Strategis : SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU : 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	101,18%	101,18%	112,05%	112,05%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	101,18%	101,18%	112,05%	112,05%	120,00%	120,00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

UNIT	CAPAIAN PENELITIAN (40%)			CAPAIAN TINDAK LANJUT (60%)				CAPAIAN IKU STRATEGIS	
	TARGET LHPT	BOBOT LHPT	%CAPAIAN	TARGET LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK		%CAPAIAN TINDAK LANJUT
STRATEGIS	160	280,2	120,00%	160	216,7	65	46,4	164,44%	120,00%

UNIT	KOMPONEN KUANTITAS (40%)						KOMPONEN KUALITAS (60%)				CAPAIAN IKU KEWILAYAHAN
	LHP2DK DARI DPP			LHP2DK DARI SP2DK OUTANDING			CAPAIAN KUANTITAS	TARGET LHP2DK	JML BOBOT LHP2DK	CAPAIAN KUALITAS	
	TARGET DPP	JUMLAH BOBOT	REALISASI	TARGET OUTSTANDING	JUMLAH BOBOT	REALISASI					
KEWILAYAHAN	84,45	48,8	57,79%	62,4	143	229,17%	120,0%	146,85	186,4	126,93%	120,00%

UNIT	REALISASI	REALISASI IKU PPM KANTOR (50%)	TRAJECTORY	%CAPAIAN IKU
REALISASI STRATEGIS	120,00%			
REALISASI KEWILAYAHAN	120,00%	120,0%	100,00%	120,00%

Pada Tahun 2024, Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai **120%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	108,31%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan konsisten dapat dipertahankan **120%** dalam 4 tahun terakhir.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Kode IKU	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi Tahun 2024
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120,00%

e. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagai berikut:
 1. Menyelesaikan mayoritas *outstanding* SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK pada tahun 2024;
 2. Melakukan penyusunan DPP dengan mempertimbangkan target penerimaan dari PKM yang berlu tercapai; dan
 3. Membuat monitoring penyelesaian SP2DK baik kuantitas maupun kualitas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan diperoleh dari integrasi data perpajakan dengan sistem pendukung lain yang mempermudah analisis.
 - Solusi yang diterapkan: meningkatkan validitas data melalui pepadanan informasi dari berbagai sumber serta memperkuat strategi komunikasi dengan Wajib Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Pelaksanaan pelatihan kepada petugas pajak dalam menganalisis dan memanfaatkan data secara optimal.
 - Pembuatan dashboard rekapitulasi kinerja account representative yang memuat capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
 - Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Evaluasi efektivitas mitigasi risiko dari tahun sebelumnya, seperti peningkatan koordinasi antar-unit dan percepatan penerbitan SP2DK.
 - Pengembangan sistem otomatisasi dalam proses penelitian dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi.
 - Mengurangi potensi kendala melalui internalisasi SOP terkait penerbitan dan tindak lanjut SP2DK.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kendala utama berupa rendahnya tingkat respons Wajib Pajak terhadap SP2DK. kesulitan dalam validasi data menyebabkan terhambatnya analisis dan penerbitan laporan.
 - Langkah perbaikan: penggunaan pendekatan persuasif melalui konsultasi langsung dengan Wajib Pajak serta peningkatan penggunaan data pihak ketiga dalam analisis.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

 - Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
 - Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun DPP dengan seksama dengan memperhatikan segala aspek data yang dimiliki oleh wajib pajak maupun pertimbangan realisasi penerimaan PKM yang belum tercapai;
2. Fokus melakukan penyelesaian atas *outstanding* SP2DK pada semester I Tahun 2025;
3. Membuat monitoring penyelesaian SP2DK baik kuantitas maupun kualitas atas AR Wajib Pajak strategis maupun kewilayahan; dan
4. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas dan mengulik teknik dan metode penggalian potensi yang efisien dan efektif untuk Wajib Pajak pada sektor tertentu.

10. Sasaran Strategis : SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU : 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	111,26%	111,26%	111,26%	111,90%	111,90%	120%	120%
Capaian	111,26%	111,26%	111,26%	111,90%	111,90%	119,94%	119,94%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun Realisasi Komponen Data STP Tahun 2024 adalah 120% & untuk komponen Pemanfaatan Data Matching adalah 119,87%, sehingga Capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Tahun 2024 adalah **119,94%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	119,94%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 119,94%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	119,94%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebagai berikut:
 1. Melakukan monitoring dafnom yang didistribusikan oleh Kantor Pusat DJP secara simultan agar setiap periode triwulan IKU dapat selalu tercapai;
 2. Melakukan penyelesaian dafnom STP yang harus diterbitkan & pemanfaatan data pemicu sesuai dengan dafnom yang turun.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 1. Keberhasilan ditunjang oleh ketersediaan data berkualitas yang dapat diakses dengan cepat dan akurat.
 2. Solusi yang diterapkan adalah peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi petugas dalam menganalisis data historis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 1. Implementasi pembuatan monitoring rekapitulasi kinerja account representative;
 2. Peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam memperoleh data yang lebih akurat dan relevan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan data tahun sebelumnya untuk memastikan efektivitasnya.
 2. Implementasi strategi mitigasi risiko melalui peningkatan kapasitas teknologi dan SDM.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Tantangan dalam pemadanan data karena ketidaksesuaian informasi antara berbagai sumber.
 - Solusi yang diterapkan adalah melakukan analisis potensi pembayaran wajib pajak dengan memanfaatkan data yang tersedia.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

2. Senantiasa melakukan monitoring atas penyelesaian dafnom STP yang seharusnya diterbitkan;

3. Melakukan pemanfaatan data pemicu Wajib Pajak untuk melakukan penggalan potensi serta melakukan penyandingan data pihak ketiga.

11. Sasaran Strategis : SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU : 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Realisasi	120,00%	88,12%	88,12%	100,70%	100,70%	120%	120%
Capaian	120,00%	88,12%	88,12%	100,70%	100,70%	120,00%	120,00%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dihitung berdasarkan 3 komponen yakni:

- 1) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Tepat Waktu
- 2) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan
- 3) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120,00%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 120%.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	120,00%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sebagai berikut:
 1. Melakukan monitoring capaian Iku secara bulanan sehingga IKU dapat terpantau untuk mencapai capaian maksimal
 2. Melakukan internalisasi mengenai penghitungan IKU karena IKU ini baru dilaksanakan pada tahun 2024
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Keberhasilan dicapai melalui penyusunan prosedur yang lebih sistematis dalam pelaksanaan komite kepatuhan. Penurunan kinerja dapat disebabkan oleh keterbatasan data valid dalam penyusunan rekomendasi kepatuhan.
 - Solusi yang diterapkan mencakup optimalisasi sistem pencatatan digital untuk meningkatkan akurasi data serta peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - 1) Implementasi pelatihan khusus bagi anggota komite kepatuhan untuk meningkatkan pemahaman terhadap indikator kepatuhan Wajib Pajak.
 - 2) Pelaksanaan monitoring berkala terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil sidang komite kepatuhan.
 - 3) Penggunaan teknologi dalam penyusunan rekomendasi dan pemantauan hasil evaluasi yang lebih akurat dan efisien.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - 1) Evaluasi terhadap rencana aksi sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas sidang komite kepatuhan.
 - 2) Implementasi mitigasi risiko berupa penguatan sumber data yang digunakan oleh komite kepatuhan guna meminimalisir kesalahan dalam identifikasi Wajib Pajak yang perlu dilakukan tindak lanjut.
 - 3) Peningkatan akurasi dalam pemetaan risiko kepatuhan dengan mengandalkan data historis dan analisis perilaku Wajib Pajak
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan komite kepatuhan. Kurangnya integrasi data antara sistem komite kepatuhan dan unit pengawasan pajak.
 - Langkah perbaikan mencakup:
 - 1) rekrutmen dan pelatihan pegawai,
 - 2) pengembangan sistem yang lebih terintegrasi untuk mengoptimalkan analisis kepatuhan.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

 - Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.

- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

- 1) Senantiasa melakukan monitoring atas penyelesaian komponen pembentuk IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu
- 2) Melaksanakan rapat rutin untuk memaksimalkan pengelolaan komite kepatuhan

12. Sasaran Strategis : SS-7 Penegakan hukum yang efektif

IKU : 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	106,56%	119,68%	119,68%	102,59%	102,59%	119,27%	119,27%
Capaian	106,56%	119,68%	119,68%	102,59%	102,59%	119,27%	119,27%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- 1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- 2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)
5. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN (60%)						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	95,47%	120,00%	18,00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	110,81%	110,81%	27,70%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	107,60%	107,60%	32,28%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	108,68%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	91,07%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						113,98%
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)		120,00%				

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan Tahun 2024 dengan penghitungan 5 variabel tersebut adalah sebesar **113,98%**.

Sedangkan realisasi untuk penghitungan IKU Efektivitas Penilaian adalah:

IKU EFEKTIVITAS PENILAIAN (40%)					
Nama Variabel	Realisasi	Target	Capaian	Bobot	Capaian Setelah Bobot
Variabel 1 - Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)	82,86%	85,00%	116,98%	60%	70,19%
Variabel 2 - Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)	120%	90,00%	120,00%	40%	48,00%
CAPAIAN IKU EFEKTIVITAS PENILAIAN (40% VARIABEL 1 + 60% VARIABEL 2)					118,19%
KOMPONEN IKU		CAPAIAN	CAPAIAN X BOBOT	CAPAIAN IKU	
IKU EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN (60%)		120,00%	72,00%	119,27%	
IKU EFEKTIVITAS PENILAIAN (40%)		118,19%	47,27%		

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	119,27%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah 119,27%

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	119,27%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembahasan usulan Daftar Sasaran Prioritas
2. Menyelesaikan Pemeriksaan secara tepat waktu
3. Melaksanakan IHT untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pemeriksaan
4. Melaksanakan monitoring tunggakan pemeriksaan guna melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan yang mendekati jatuh tempo pemeriksaan.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Keberhasilan ditunjang oleh efektivitas strategi pemeriksaan yang berbasis risiko serta peningkatan kualitas data dalam menentukan potensi pajak.
- Kendala yang dihadapi meliputi ketidakakuratan data potensi
- Solusi yang diterapkan meliputi optimalisasi data matching dan peningkatan kolaborasi dengan account representative.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - 1) Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap prosedur pemeriksaan dan mekanisme penilaian pajak.
 - 2) Penguatan sistem audit dan monitoring untuk memastikan kualitas serta efektivitas pemeriksaan pajak.
 - 3) Pemanfaatan teknologi dalam analisis dan penyajian data potensi untuk meningkatkan ketepatan penilaian pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - 1) Mitigasi risiko berupa peningkatan transparansi dalam proses pemeriksaan serta penguatan akurasi dalam penerbitan SKP.
 - 2) Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tahun sebelumnya guna meningkatkan kualitas rekomendasi pajak di tahun berjalan.
 - 3) Optimalisasi sistem manajemen risiko dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa guna meningkatkan efisiensi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kendala utama : keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dalam analisis pemeriksaan dan penilaian pajak. Permasalahan lain berupa ketidaksesuaian data potensi dengan realisasi SKP yang diterbitkan.
 - Langkah perbaikan mencakup pelatihan berkala bagi pemeriksa pajak dan penilai pajak serta optimalisasi sistem pemadanan data.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

 - Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
 - Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.

- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Peta Kepatuhan, Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) serta Daftar Sasaran Penilaian (DSPn) Tahun 2025;
2. Administrasi Pemeriksaan Sebelum Pemeriksaan s.d. penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2);
3. Monitoring Tunggakan Pemeriksaan Rutin dan Khusus;
4. Melaksanakan Koordinasi Pengawasan SPT Lebih Bayar dengan seksi terkait (Pelayanan dan Pengawasan);
5. Monitoring Penyelesaian Pemeriksaan FPP;
6. Penyampaian Usulan DSPP Tepat Waktu; dan
7. Mengadakan *In House Training* Penyegaran Peraturan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak.
8. Melakukan monitoring rutin terhadap IKU terkait.

13. Sasaran Strategis : SS-7 Penegakan hukum yang efektif

IKU : 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	15,83%	41,34%	41,34%	69,71%	69,71%	99,54%	99,54%
Capaian	105,53%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Berdasarkan penghitungan realisasi yang tergenerate pada dashboard kinerja organisasi diketahui realisasi realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan Tahun 2024 sebesar **99,54%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	-	106,86%	86,06%	99,54%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 berhasil mencapai 99,54%. Realisasi ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. KPP Pratama Makassar Selatan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas kinerja efektivitas penagihan di tahun mendatang.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	99,54%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebagai berikut:

1. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Cair (DSPC) dan membahasnya dalam Komite Kepatuhan;
 2. Melakukan tindakan penagihan berupa melakukan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, melaksanakan sita, melaksanakan blokir, menjual barang sitaan dan melakukan pencegahan dengan menyusun *timeline* dan prioritas kegiatan; serta
 3. Melakukan peningkatan sumber daya penagihan dengan mengangkat Juru Sita baru pada tahun 2024.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan ditunjang oleh penerapan strategi penagihan yang akurat dan berbasis risiko.
 - Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat respons Wajib Pajak terhadap tindakan penagihan.
 - Solusi yang diterapkan termasuk intensifikasi komunikasi, penerbitan produk hukum penagihan tepat waktu, dan peningkatan pengawasan terhadap piutang pajak.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - 1) Peningkatan jumlah dan efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi internal dalam pemantauan status piutang pajak.
 - 3) Implementasi sistem evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi penagihan pajak.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - 1) Evaluasi terhadap efektivitas tindakan penyitaan dan penyanderaan.
 - 2) Implementasi mitigasi risiko berupa penguatan data dan sistem pemantauan piutang pajak.
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kendala utama meliputi keterbatasan akses terhadap aset Wajib Pajak yang dapat disita. Tantangan lainnya adalah keberatan hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak atas tindakan penagihan.
 - Langkah perbaikan mencakup peningkatan regulasi dan kebijakan terkait penagihan serta kerja sama dengan lembaga hukum untuk mempercepat proses eksekusi.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti**

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

▪ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindakan penagihan dengan efektif;
2. Melakukan penelusuran keberadaan aset (*Asset Tracing*) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
3. Melakukan Pembahasan atas Penunggak Pajak yang akan disusun ke dalam DSPC;

4. Melakukan pemanggilan/pembahasan tunggakan pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
5. Menyelesaikan usulan penghapusan Piutang Pajak;
6. Melakukan digitalisasi Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Blokir, dan dokumen penagihan lainnya;
7. menyelesaikan tindak lanjut tunggakan besar yang menjadi perhatian BPK yaitu nilai tunggakan di atas Rp100 juta per WP sampai tindakan penagihan maksimal.

14. Sasaran Strategis : SS-7 Penegakan hukum yang efektif

IKU : 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi						100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Telah dilakukan Usulan Bukti Permulaan pada 15 November 2024 berdasarkan Berita Acara Penelahaan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-33/USUL.BP/WPJ.15/2024, sehingga realisasi IKU nya adalah **100%**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar **100%**. IKU ini merupakan IKU baru Tahun 2024 sehingga atas kinerja IKU ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 setiap seksi pengawasan telah berkontribusi melakukan upaya dalam proses pengusulan wajib pajak yang perlu dilakukan usulan bukti permulaan
2. Melakukan monitoring usulan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 1. Keberhasilan dicapai melalui peningkatan kompetensi pemeriksa pajak dalam mendeteksi indikasi pelanggaran perpajakan.
 2. Kegagalan atau keterlambatan dapat disebabkan oleh kurangnya bukti pendukung yang cukup untuk mendukung usulan pemeriksaan bukti permulaan.
 3. Solusi yang diterapkan mencakup optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dari berbagai sumber, serta peningkatan koordinasi dengan unit intelijen dan penegakan hukum pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 1. Pelaksanaan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pajak dalam mendeteksi dan menyusun usul pemeriksaan bukti permulaan.
 2. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap setiap usulan pemeriksaan guna meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran.
 3. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait untuk mempercepat verifikasi data dan bukti sebelum pengajuan usulan pemeriksaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 1. Evaluasi atas implementasi mitigasi risiko menunjukkan peningkatan kualitas penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan.
 2. Penguatan kebijakan internal untuk memastikan bahwa setiap usulan pemeriksaan didukung oleh bukti yang kuat dan sah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 1. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penyusunan usulan pemeriksaan bukti permulaan.
 2. Tantangan lainnya adalah keterlambatan dalam memperoleh data pendukung yang valid dari berbagai instansi terkait.
 3. Langkah perbaikan mencakup peningkatan kapasitas petugas pajak dengan penyelenggaraan ToK ataupun IHT terkait analisis usulan bukti permulaan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

 - Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
 - Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

▪ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat dengan membahas satu per satu usulan wajib pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan, untuk memitigasi terjadinya penolakan;
2. Membuat target dan monitoring usulan pemeriksaan atas tiap seksi pengawasan.

15. Sasaran Strategis : SS-8 Data Informasi yang berkualitas

IKU : 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	27,50%	77,21%	77,21%	115,00%	115,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun penghitungan dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Makassar Selatan nomor ND-1996/KPP.1502/2024 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Pengamatan KPP Pratama Makassar Selatan Triwulan IV Tahun 2024 telah dilaksanakan dan disusun 5 Laporan Pengamatan dengan target yang ditetapkan adalah 4 Laporan sehingga realisasi **120%**.

- **Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

Berdasarkan data Mandor-DJP per 31 Desember 2024, data potensi yang diproduksi oleh KPP Pratama Makassar Selatan adalah 1.832 data dari target 1.360 data sehingga realisasi dari komponen IKU ini adalah 120%

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan jika diformulasikan adalah **120,00%**

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	120%

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120%.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	120%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian formal tepat waktu atas laporan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dari Seksi Pengawasan;

2. Melakukan Penatausahaan data notaris sebagai bahan penggalian potensi pengawasan dan perekaman data notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 3. Memanfaatkan data eksternal seperti data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai bahan data untuk penyediaan data dan potensi perpajakan;
 4. Melakukan rapat pembahasan untuk menentukan target wajib pajak yang perlu dilakukan pengamatan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan:
 1. Adanya monitoring dalam penyelesaian laporan pengamatan.
 2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam melakukan pengamatan
 3. Implementasi teknologi analisis data yang memudahkan pemantauan potensi perpajakan.
 4. Penggunaan basis data terintegrasi yang mempercepat proses validasi data.

Alternatif Solusi:

 1. Meningkatkan pelatihan pegawai terkait teknik analisis data dan sistem informasi perpajakan.
 2. Menjalin kerja sama yang lebih erat dengan lembaga statistik dan dinas terkait untuk memperoleh data yang lebih valid.
 3. Menyusun mekanisme *early warning system* untuk mendeteksi potensi keterlambatan dalam penyelesaian laporan pengamatan.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 1. Peningkatan kualitas basis data perpajakan, dengan memadankan data internal DJP dengan data dari instansi lain.
 2. Pelatihan teknis bagi pegawai mengenai metode pengolahan dan analisis data perpajakan.
 3. Sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan lengkap.
 4. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perpajakan guna mendukung percepatan penyelesaian laporan.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang telah dilakukan:
 1. Pemantauan berkala terhadap progres laporan melalui dashboard pemantauan.
 2. Penyediaan pedoman teknis yang lebih jelas bagi pegawai dalam melakukan pengamatan dan penyediaan data.
 3. Peningkatan sinergi dengan sektor eksternal untuk memperkaya sumber data perpajakan.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- 1) Keterbatasan tenaga ahli dalam pengolahan data perpajakan.
- 2) Kesulitan dalam mengakses data wajib pajak yang belum terdaftar secara formal.
- 3) Terbatasnya sistem informasi perpajakan yang dapat mengintegrasikan berbagai sumber data eksternal.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- 1) Melakukan pelatihan intensif bagi pegawai dalam penggunaan software analisis data.
- 2) Memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning untuk menyaring dan menganalisis data lebih cepat.
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait guna memperluas cakupan data yang tersedia.

▪ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

▪ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan data eksternal lain selain data LPSE, dapat memanfaatkan data faktur 000 yang belum memiliki NPWP sebagai bahan penyediaan data dan potensi perpajakan sekaligus sebagai upaya ekstensifikasi penambahan Wajib Baru;
2. Melakukan rapat pembahasan atas wajib pajak yang akan disasar untuk dilakukan pengamatan; dan
3. Bekerja sama dengan pihak eksternal ataupun Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan sebagai bahan pengamatan ataupun penyediaan data potensi perpajakan.

16. Sasaran Strategis : SS-8 Data Informasi yang berkualitas

IKU : 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	9,60%	68,80%	68,80%	68,80%	68,80%	68,80%	68,80%
Capaian	96,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Jenis Data	Realisasi Jumlah Penyampaian (40%)			Realisasi Data dengan status Lengkap (60%)			Realisasi IKU	Bobot IKU	%Realisasi IKU
	Jumlah Data Disampaikan	Target Data yang Wajib disampaikan	%Realisasi Penyampaian	Jumlah Data Status Lengkap	Target Jumlah data yang diterima	%Realisasi Data Status Lengkap			
Data Utama Regional	5	5	40%	2	5	24%	64%	70%	44,80%
Data Regional Lainnya	1	2	20%	1	1	60%	80%	30%	24,00%
Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP									68,80%
%Capaian penghimpunan data regional dari ILAP (Realisasi / Target TW 3)									120,00%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara nomor ND-6831/WPJ.15/2024 perihal Revisi Target Keempat IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP Tahun 2024, ditetapkan Target KPP Pratama Makassar Selatan adalah Target Bersama dengan jumlah Target Data Utama Regional sebanyak 5 dan Target data regional lainnya sebanyak 2.

Adapun realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah :

1. Data Utama Regional = Realisasi 64% (Bobot 70%)
2. Data Regional Lainnya = Realisasi 80% (Bobot 30%)

Sehingga realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP Tahun 2024 setelah diformulasikan dengan bobot adalah **68,80%**

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
8b-CP	Persentase penghimpunan data dari ILAP	-	-	-	75,00%	68,80%

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 68,80%, lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun secara capaian IKU sudah tercapai 120%

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
8b-CP	Persentase penghimpunan data dari ILAP	55,00%	55,00%	68,80%

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak penyedia data terkait pemberian data yang diajukan;
2. Bekerja sama dengan KPP di wilayah kota makassar, untuk menjalin Kerjasama dengan instansi pemilik data

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan:

- 1) Dukungan regulasi yang kuat, seperti PMK-228/2017 dan PKS Tripartit, yang menjadi dasar hukum dalam penghimpunan data.
- 2) Peningkatan kapasitas pegawai DJP dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan ILAP untuk pertukaran data.
- 3) Integrasi sistem ILAP dengan sistem lain di Direktorat Jenderal Pajak, yang memungkinkan pemanfaatan data lebih luas dalam pengawasan perpajakan.

Kegagalan/Penurunan Kinerja:

- 1) Ketidaktepatan waktu penyampaian data oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam kategori Data Utama Regional, akibat kurangnya pemahaman atau kendala teknis.
- 2) Kualitas data yang kurang memenuhi standar kelengkapan akibat kolom mandatory yang tidak diisi lengkap atau data yang tidak tervalidasi dengan baik.
- 3) Koordinasi yang kurang efektif antarinstansi, khususnya dalam menetapkan target dan konfirmasi ketersediaan data di tingkat daerah.

Alternatif Solusi:

- 1) Meningkatkan koordinasi melalui pertemuan rutin antara Kanwil DJP/KPP dan Pemerintah Daerah untuk membahas kendala dan mencari solusi dalam penyampaian data.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang menunjang keberhasilan:
 - 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada Pemerintah Daerah mengenai cara pelaporan data regional melalui ILAP.
 - 2) Evaluasi kinerja penyampaian data secara periodik untuk memantau progres dan memastikan target penghimpunan data tercapai.
 - 3) Penggunaan teknologi analitik untuk mengevaluasi kualitas data yang dikirimkan, sehingga data yang diterima dapat langsung dimanfaatkan oleh DJP.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang telah dilakukan:
 - 1) Jika terdapat Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan data, dilakukan pendekatan proaktif melalui komunikasi langsung dan pemberian asistensi teknis.
 - 2) Jika data yang disampaikan tidak memenuhi standar kelengkapan, dilakukan pengembalian data untuk diperbaiki sebelum diterima sebagai data final.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi:
 - 1) Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang pentingnya penyampaian data ILAP, terutama bagi daerah yang baru bergabung dalam PKS Tripartit.
 - 2) Terbatasnya sumber daya manusia di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyampaian data perpajakan.
 - 3) Keterlambatan penyampaian data regional, terutama untuk kategori Data Utama Regional, akibat kendala administrasi di daerah.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- Menyediakan bimtek bagi Pemerintah Daerah tentang tata cara pengisian dan penyampaian data regional.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- B. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- C. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- D. Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Kerjasama dengan KPP di wilayah kota makassar, untuk menjalin Kerjasama dengan instansi pemilik data;
2. Melakukan percepatan pengumpulan dan kelengkapan data ILAP.

17. Sasaran Strategis : SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,19	117,19
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,19%	117,19%

Penghitungan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM disusun dari dua komponen yakni:

- 3) Komponen 1 – Kualitas Kompetensi (bobot 50%)
- 4) Komponen 2 – Pelaksanaan Kegiatan Bintal SDM (bobot 50%)

Berdasarkan hasil generate dashboard kinerja organisasi pada aplikasi mandor, realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,19

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,19

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Tahun 2024 adalah 117,19.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	117,19

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Kepegawaian (UPK) telah melakukan pendampingan dan pembekalan kepada pegawai yang akan melakukan ujian kompetensi;
 2. UPK senantiasa mengupayakan sarana dan prasarana terbaik kepada pegawai yang melaksanakan *assessment center* ataupun ujian kompetensi guna mendukung kenyamanan peserta dalam pelaksanaan kegiatan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan:
 - 1) Adanya sistem penilaian kompetensi yang objektif dan terstruktur, seperti SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang terukur.
 - 2) Ketersediaan akses pelatihan dan sertifikasi yang lebih luas, termasuk melalui platform studia / KLC Kemenkeu
 - 3) Dukungan penuh dari manajemen dalam pengembangan pegawai, baik dalam bentuk anggaran maupun kebijakan yang pro terhadap pengembangan SDM.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang menunjang keberhasilan:
 - 1) Tersedianya banyak pelatihan KLC open access sehingga pegawai dapat meningkatkan kapasitas lebih mudah;
 - 2) UPK menyediakan kegiatan In House Training yang bermanfaat bagi pegawai dan dapat diklaim sebagai peningkatan jam pelatihan pegawai
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi Risiko yang Telah Dilakukan:
 - 1) Jika terjadi keterbatasan anggaran, dilakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal yang menyediakan pelatihan gratis atau menyediakan narasumber dari pihak internal.
 - 2) Jika tingkat partisipasi pegawai dalam pelatihan rendah, dilakukan sosialisasi yang lebih aktif serta pemberian souvenir bagi pegawai yang mengikuti pelatihan.
 - 3) Jika ada kesenjangan kompetensi yang signifikan, dilakukan evaluasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis kinerja pegawai.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang Dihadapi:
 - 1) Minimnya waktu yang tersedia bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan akibat beban kerja yang tinggi.
 - 2) Kurangnya minat pegawai dalam mengikuti program pengembangan SDM akibat tidak adanya kaitan langsung dengan insentif atau promosi jabatan.

Langkah-Langkah yang Telah Diambil:

- 1) Mendorong pegawai untuk mengikuti e-learning berbasis self-paced learning, sehingga pegawai dapat menyesuaikan jadwal belajarnya sendiri.
- 2) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang aktif mengikuti program pelatihan, seperti penghargaan berbasis pencapaian kompetensi.
- 3) Memasukkan indikator kompetensi sebagai salah satu faktor dalam penilaian kinerja pegawai, sehingga ada dorongan lebih besar untuk meningkatkan keterampilan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan, pembekalan, dan penyiapan sarana dan prasarana terbaik kepada peserta yang akan mengikuti ujian kompetensi dan *assessment center*;
2. Menyusun *timeline* dan *early warning* persiapan ujian kepada calon peserta ujian.

18. Sasaran Strategis : SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00%	85,00%	85	85
Realisasi				100,00%	100,00%	93,40	93,40
Capaian				117,65%	117,65%	109,88%	109,88%

Berdasarkan hasil generate Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor-DJP, Realisasi Hasil Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar **93,40**.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94,45	94,51	94,86	93,40

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Makassar Selatan dalam 4 tahun terakhir cenderung stabil, terdapat kontraksi penurunan hasil survei pada tahun 2024. KPP Pratama Makassar Selatan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai indeks penilaian integritas yang lebih baik di tahun selanjutnya.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	93,40

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

▪ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi kepada pegawai di tahun 2024;
2. Senantiasa melakukan pengawasan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit KPP Pratama Makassar Selatan;

3. Menyusun list responden survei untuk masing masing komponen Pelayanan, Pemeriksaan, Penagihan, dan Pengawasan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan:
 - 1) Penerapan sistem pelayanan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan Wajib Pajak, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.
 - 2) Pelaksanaan survei secara independen oleh Direktorat KITSDA, yang memastikan hasil yang lebih objektif dan akurat.
 - 3) Adanya mekanisme koreksi terhadap hasil survei jika ditemukan bukti pengondisian responden atau fraud, yang menjaga kredibilitas penilaian.

 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang Menunjang Keberhasilan:
 - 1) Digitalisasi layanan perpajakan, seperti e-Filing, e-Form, dan e-Billing, untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dalam aspek pelayanan.
 - 2) Program edukasi dan konsultasi perpajakan secara rutin kepada Wajib Pajak agar mereka lebih memahami proses pemeriksaan dan pengawasan pajak.
 - 3) Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Compliance) untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengawasan dan pemeriksaan pajak.
 - 4) Internal audit berkala untuk mencegah adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menurunkan skor indeks integritas.

 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi Risiko yang Telah Dilakukan:
 - 1) Jika terjadi kasus fraud atau pelanggaran disiplin, segera dilakukan investigasi dan tindakan tegas kepada pelaku untuk meminimalkan dampak terhadap indeks integritas.
 - 2) Jika terjadi persepsi negatif dari Wajib Pajak, dilakukan pendekatan edukatif dan sosialisasi ulang tentang peraturan perpajakan yang berlaku.
 - 3) Jika ditemukan indikasi pengondisian responden survei, dilakukan validasi ulang oleh tim independen untuk memastikan hasil survei tetap kredibel.

 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang Dihadapi:
 - 1) Adanya Wajib Pajak yang tidak memahami proses pemeriksaan dan pengawasan pajak, sehingga menilai pelayanan secara negatif meskipun telah dilakukan sesuai prosedur.

- 2) Potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai, yang dapat merusak persepsi masyarakat terhadap DJP secara keseluruhan.
- 3) Tantangan dalam memastikan kejujuran responden survei, terutama jika ada indikasi tekanan dari pihak tertentu.

Langkah-Langkah yang Telah Diambil:

- 1) Menyediakan mekanisme komunikasi terbuka dengan Wajib Pajak, seperti hotline pengaduan dan sesi konsultasi pajak.
 - 2) Melakukan survei internal sebagai bentuk early warning system, sebelum survei resmi dari KITSDA dilakukan.
 - 3) Meningkatkan transparansi dalam setiap layanan perpajakan, dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada Wajib Pajak.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan SOP atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di KPP Pratama Makassar Selatan;
2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait nilai-nilai anti korupsi;
3. Menyusun *longlist* responden untuk masing-masing komponen yang kemudian dipilah kembali menjadi *shortlist* calon responden yang memiliki kapabilitas untuk dijadikan responden survei.

19. Sasaran Strategis : SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	28,97	64,40	64,40	90,50	90,50	100,00	100,00
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,11%	111,11%

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja (50%)		TARGET	Periode Pelaksanaan				Realisasi s.d
No	Unsur Penilaian	SETAHUN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW4
1	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	17,5	3,00	8,50	3,00	3,00	17,50
2	Pelaksanaan DKRO	17,5	3,00	8,50	3,00	3,00	17,50
3	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	10			15,00		15,00
Jumlah poin maksimal Indeks Implementasi Manajemen Kinerja adalah 50 poin.		45	6,00	17,00	21,00	6,00	50,00

Indeks Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko (50%)		TARGET	Periode Pelaksanaan				Realisasi s.d
No	Unsur Penilaian	SETAHUN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW4
1	Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu (1 Poin)	1	1,00				1,00
2	Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO (2,5 poin/ Triwulan) (Max 10 Poin)	10	2,5	2,5	2,5	2,5	10,00
3	Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu 1 poin/ Triwulan (Max 4 Poin)	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
4	Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Max 35 Poin)	35	18,47	25,93	35,00	35,0	35,00
Jumlah poin maksimal unsur penilaian Efektifitas MR adalah 50 poin.		50	22,97	29,43	38,50	38,50	50,00

REALISASI IKU (Nilai Indeks Manajemen Kinerja + Nilai Indeks MR)							100,00
CAPAIAN IKU (REALISASI IKU / TARGET TRIWULAN 4 (90 POIN))							111%

▪ **Dialog Kinerja Organisasi (DKO)**

Merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan

besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 . Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi. Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Risalah Rapat (10 poin);
2. Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko sesuai KMK-300/KMK.01/2022 (10 poin) ;
3. Efektivitas Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (maksimal 20 poin);
4. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (10 poin);
5. Penjelasan Progres IKU (10 poin);
6. Matriks Tindak Lanjut (10 poin);

▪ **Penerapan Manajemen Risiko**

Unsur Penilaian pada Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (5 poin)
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO (10 poin);
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (10 poin).

Realisasi Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2024 telah tercapai 100% dengan perolehan poin maksimal untuk setiap komponen.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	100

Realisasi Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 berhasil mencapai poin maksimal yakni 100. KPP Pratama Makassar Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Dialog Kinerja Organisasi dan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko ketidaktercapaian IKU.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90	100

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan dialog kinerja organisasi dengan memperhatikan ketercapaian poin yang dipersyaratkan;
2. Melakukan dokumentasi pelaksanaan Manajemen Risiko dengan seksama.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan:

- 1) Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, sehingga setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola kinerja dan risiko.
- 2) Penerapan IKU yang lebih objektif, sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara akurat dan transparan.
- 3) Dukungan manajemen puncak dalam implementasi manajemen risiko, sehingga ada penguatan budaya sadar risiko di lingkungan kerja.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang Menunjang Keberhasilan:

- 1) Penyusunan Identifikasi Risiko membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak awal.
- 2) Pengembangan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan kinerja secara lebih akurat dan cepat.
- 3) Pelaksanaan audit internal secara berkala, guna memastikan bahwa manajemen kinerja dan risiko diterapkan sesuai standar.
- 4) Peningkatan keterlibatan pegawai dalam penyusunan strategi kinerja, sehingga ada rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap pencapaian target organisasi.

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi Risiko yang Telah Dilakukan:

- 1) Jika ada ketidaksesuaian antara target kinerja dan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian strategi berbasis data untuk memperbaiki perencanaan.
- 2) Jika terjadi resistensi terhadap implementasi manajemen risiko, dilakukan sosialisasi intensif dan pelibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Jika ada ketidakefektifan dalam pelaksanaan program kinerja, dilakukan evaluasi berkala dan penyesuaian strategi secepatnya.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang Dihadapi:

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai tentang pentingnya manajemen kinerja dan risiko.
- 2) Belum optimalnya integrasi sistem digital dalam pemantauan kinerja dan risiko, sehingga masih ada proses manual yang memakan waktu.
- 3) Keterbatasan sumber daya untuk implementasi strategi mitigasi risiko, terutama dalam hal teknologi dan pelatihan.

Langkah-Langkah yang Telah Diambil:

- 1) Melakukan pelatihan dan workshop khusus tentang manajemen kinerja dan risiko bagi seluruh pegawai.
- 2) Mengembangkan sistem dashboard berbasis data analytics untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kinerja dan risiko.
- 3) Memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam penyusunan strategi mitigasi risiko, agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan.

▪ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan rencana kerja yang dibentuk oleh setiap seksi/bagian dengan manajemen risiko KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2025;
2. Mendokumentasikan dan melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko dengan memperhatikan komponen yang dipersyaratkan.

20. Sasaran Strategis : SS-10 Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

IKU : 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,00	99,12	99,12	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00%	99,12%	99,12%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

NILAI IKPA + NILAI SMART

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	635890	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN	97,92	99,54	98,73

PENGHITUNGAN CAPAIAN

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 - 95)$
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 * (80 - 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

CAPAIAN IKU	NKA > 95, SEHINGGA CAPAIAN 120%
--------------------	---

Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKKPA) dihitung dengan menjumlahkan 2 komponen penghitungan yakni komponen penilaian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu

(SMART). IKKPA memiliki tantangan untuk memperoleh poin maksimal dikarenakan terdapat 2 komponen penghitungan berbanding terbalik antara nilai IKPA yang memfokuskan penyerapan anggaran secara maksimal dengan SMART yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 berhasil mencapai 98,73 atau jika dikonversi ke capaian, maka tercapai sebesar 120%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 Tahun sebelumnya

Kode IKU	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	113,76	120,00

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKKPA) tahun 2024 berhasil mencapai nilai Indeks sebesar 120. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

c. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

▪ **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian pembayaran tagihan (pihak ketiga) tepat waktu;
2. Melakukan penyelesaian kewajiban perpajakan tepat waktu;
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tepat waktu;
4. Melakukan penggantian (Revolving) UP Tepat Waktu; dan
5. Melaksanakan pertanggungjawaban Surat Perjalanan Dinas Pindah Secara Tepat Waktu.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan:

- 1) Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan anggaran, seperti PMK 62 Tahun 2023 dan PMK 113 Tahun 2023, yang memastikan anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel.
- 2) Penerapan sistem monitoring yang ketat, yang memungkinkan evaluasi real-time terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
- 3) Optimalisasi standar biaya keluaran umum (SBKU) sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga mencegah pemborosan.

Kegagalan/Penurunan Kinerja:

- 1) Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, misalnya overbudgeting atau underbudgeting, yang menyebabkan realisasi anggaran tidak optimal.
- 2) Keterlambatan dalam pencairan anggaran, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja.
- 3) Kurangnya koordinasi antarunit kerja dalam penggunaan anggaran, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan aktual dan alokasi anggaran yang tersedia.

Alternatif Solusi:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan berbasis data historis dan tren kebutuhan aktual guna menghindari ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi.
- 2) Menerapkan sistem pemantauan lebih ketat di aplikasi SMArT DJA, guna memastikan pengeluaran sesuai standar efisiensi yang ditetapkan.
- 3) Melakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran.

▪ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang Menunjang Keberhasilan:

- 1) Implementasi standar biaya keluaran umum (SBKU) sebagai dasar penilaian efisiensi anggaran.
- 2) Sistem monitoring dan evaluasi berbasis aplikasi, seperti SMArT DJA, yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap anggaran yang telah digunakan.
- 3) Pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola anggaran di unit kerja, guna meningkatkan pemahaman terhadap prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- 4) Peningkatan kerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, guna memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

▪ **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi Risiko yang Telah Dilakukan:

- 1) Jika terjadi ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran, dilakukan evaluasi cepat dan penyesuaian realokasi anggaran.
- 2) Jika ada potensi keterlambatan dalam pencairan anggaran, dilakukan penjadwalan ulang dan komunikasi lebih aktif dengan unit terkait.
- 3) Jika terdapat overbudgeting atau underbudgeting, dilakukan review dan revisi anggaran berdasarkan kebutuhan aktual.

▪ **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang Dihadapi:

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai terkait mekanisme efisiensi anggaran, sehingga masih ditemukan belanja yang tidak sesuai dengan prinsip hemat dan efisien.
- 2) Terbatasnya fleksibilitas dalam realokasi anggaran, sehingga sulit menyesuaikan dengan kondisi aktual yang berubah.
- 3) Adanya kendala dalam implementasi sistem pemantauan anggaran, terutama dalam integrasi dengan sistem lain di DJP.

Langkah-Langkah yang Telah Diambil:

- 1) Peningkatan pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen anggaran, agar setiap unit kerja lebih memahami prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- 2) Mempercepat proses validasi dan persetujuan anggaran, guna menghindari keterlambatan pencairan dana.
- 3) Optimalisasi penggunaan sistem digital, sehingga monitoring anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif.

▪ **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam melakukan pencapaian IKU, pihak DJP memastikan:

- Tidak ada diskriminasi terhadap sektor-sektor yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pajak, baik karena faktor gender maupun disabilitas.
- Melakukan edukasi mengenai kewajiban pajak secara luas agar masyarakat, agar pajak semakin dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti pembangunan akses bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial.

▪ **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian subsidi dan program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi KPP Pratama Makassar Selatan untuk mencapai target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian data pada Surat Perintah Bayar;
2. Memverifikasi kebenaran dokumen-dokumen tagihan yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Uang Persediaan (UP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas tagihan melalui mekanisme UP;
4. Menginput data kuitansi pada aplikasi sakti dan melakukan rekonsiliasi manual atas kuitansi tersebut untuk memastikan saldo telah sesuai;
5. Melakukan pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak dari pihak ketiga selaku pemotong/pemungut pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
6. Melakukan pelaporan SPT masa tepat waktu;
7. Melakukan distribusi bukti potong tepat waktu;
8. Membuat register penutupan kas;
9. Menatausahakan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran;
10. Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) untuk pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP);
11. Membuat surat perintah pembayaran GUP atas dasar DRPP;
12. Melakukan Pembayaran Dropping Surat Perintah Perjalanan Dinas Pindah Kepada Pegawai; dan
13. Mengirimkan berkas pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas pindah secara fisik dan melalui aplikasi SIKEU.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran KPP Pratama Makassar Selatan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Alokasi DIPA Tahun 2024	:	Rp 4.469.195.000
1. Alokasi belanja pegawai	:	Rp 990.082.000
2. Alokasi belanja barang	:	Rp 3.408.148.000
3. Alokasi belanja modal	:	Rp 70.965.000

Realisasi Anggaran Tahun 2024 KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 97,46% dari DIPA Tahun 2024. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2024	:	Rp 4.356.117.990
1. Realisasi belanja pegawai	:	Rp 971.764.000
2. Realisasi belanja barang	:	Rp 3.316.189.210
3. Alokasi belanja modal	:	Rp 68.164.780

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, organisasi telah melakukan berbagai langkah efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mencapai kinerja yang optimal. Efisiensi ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu efisiensi anggaran, sumber daya manusia, organisasi, pemanfaatan aset, dan teknologi informasi. Berikut adalah uraian dari masing-masing aspek efisiensi yang telah diterapkan:

1. Efisiensi dalam Penggunaan Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prinsip hemat, efisien, dan akuntabel. Upaya efisiensi yang telah diterapkan meliputi:

- Optimalisasi perencanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan riil dan analisis data historis, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang berlebihan atau kurang.
- Pemanfaatan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai acuan dalam setiap belanja operasional, guna memastikan penggunaan anggaran sesuai standar yang telah ditetapkan.
- Digitalisasi proses administrasi keuangan, seperti penggunaan aplikasi Smart DJA, yang mengurangi biaya pencetakan dokumen dan mempercepat proses persetujuan anggaran.
- Penekanan biaya perjalanan dinas dengan memaksimalkan penggunaan teknologi konferensi virtual untuk rapat dan koordinasi lintas unit.

2. Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam aspek SDM, efisiensi dicapai dengan mengoptimalkan kompetensi pegawai serta redistribusi tugas dan fungsi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Implementasi sistem kerja berbasis kinerja, di mana setiap pegawai diberikan target yang terukur dan berbasis output, sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

- b) Pengurangan beban kerja administratif pegawai melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, seperti digitalisasi laporan dan sistem perizinan berbasis aplikasi.
- c) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan daring yang lebih fleksibel dan mengurangi biaya pelatihan konvensional, seperti pelatihan tatap muka dan perjalanan dinas.
- d) Optimalisasi skema kerja hybrid untuk meningkatkan keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pegawai, tanpa mengorbankan kinerja organisasi.

3. Efisiensi dalam Struktur Organisasi

Penyesuaian struktur organisasi dilakukan agar lebih ramping, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika tugas dan fungsi organisasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi:

- a) Penyederhanaan birokrasi internal, dengan mengurangi proses yang tidak memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan.
- b) Peningkatan koordinasi lintas unit kerja untuk mengurangi duplikasi tugas dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- c) Integrasi beberapa fungsi yang memiliki keterkaitan tinggi, sehingga meminimalkan batas pemisah dalam pelaksanaan tugas.

4. Efisiensi dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan aset organisasi dilakukan secara optimal guna mengurangi biaya operasional dan meningkatkan nilai guna dari setiap aset yang dimiliki. Upaya efisiensi yang dilakukan meliputi:

- a) Optimalisasi penggunaan kendaraan dinas, termasuk pengaturan ulang jadwal penggunaan kendaraan untuk meminimalkan biaya bahan bakar dan pemeliharaan.
- b) Inventarisasi dan pemetaan ulang aset organisasi, sehingga aset yang tidak digunakan dapat dialihkan atau dimanfaatkan kembali.

5. Efisiensi dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Beberapa inisiatif yang telah diterapkan meliputi:

- a) Penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik (satu kemenkeu) untuk mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat akses informasi.
- b) Implementasi sistem cloud computing, berupa one-drive kemenkeu yang memungkinkan akses data secara lebih fleksibel dan efisien.
- c) Peningkatan keamanan siber dan integrasi sistem IT dengan selalu memastikan server antivirus berjalan untuk memastikan kelancaran operasional tanpa gangguan teknis yang dapat menurunkan produktivitas.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2024 adalah laporan atas hasil kinerja unit selama satu tahun anggaran yang berisi berbagai upaya dalam mencapai sasaran strategis KPP Pratama Makassar Selatan dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Makassar Selatan sekaligus juga merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN bepedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Secara umum capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis KPP Pratama Makassar Selatan selama tahun 2024. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh Pegawai dan Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh Komite Kepatuhan KPP dan Seksi terkait secara periodik. Unit Kepatuhan Internal KPP dan Kantor Wilayah dapat melakukan pemantauan atas kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan tersebut.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah mencapai capaian yang sangat baik, seluruh ini berada pada zona hijau dengan capaian diatas 100%. Indeks Capaian Kinerja KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2024 yaitu tercapai sebesar **110,18**.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja meskipun terdapat

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Laporan Kinerja KPP Pratama Makassar Selatan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja KPP pada tahun yang akan datang.

Dalam menghadapi tantangan tahun 2025, KPP Pratama Makassar Selatan selalu berupaya untuk mencapai target penerimaan perpajakan yang telah diamanahkan. Kendala dan permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama akan dilakukan dengan lebih intensif sebagai bentuk komitmen KPP Pratama Makassar Selatan untuk senantiasa berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan terbaik.